



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

NOMOR 100.3.3.4/48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG NOMOR 100.3.3.4/18 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/161 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 100.3.3.4/18 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/42/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/43/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/086/V/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/087/V/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Sekretaris Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 100.3.3.4/18 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 40);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 38);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 100.3.3.4/18 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 100.3.3.4/18 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengusulan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
NOMOR 100.3.3.4/48 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG NOMOR 100.3.3.4/18 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BIRO	Nama NIP Jabatan	Kode			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
			Prog	Keg	Sub keg	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH .	KASUBBAG KEUANGAN	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
			01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		KASUBBAG SARANA DAN PRASARANA	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			01	1.07	0005	Pengadaan Mebel
			01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
KASUBBAG PELAYANAN RUMAH TANGGA		01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel
		01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
KASUBBAG TU DAN RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR		01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
			01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
			01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan
	KABAG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
			01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
			01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
			01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
			01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
2.	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	ENY LESTARI, ST, MT 19721201 199803 2 011 Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

		SARWORINI, SP, MSi 19660718 199401 2 002 Analis Kebijakan Ahli Madya	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		BAGUS RACHMOYOJATI, S.Pt 19750523 200312 1 003 Analis Kebijakan Ahli Madya	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
3.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	TEMMY PURBOYONO, ST, SH, MM, MT 19730106 199903 1 010 Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD
		01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
		08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
		08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	
		Dra. ENY ROKHISAH, M.Kes 19660928 199303 2 005 Analis Kebijakan Ahli Madya	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	
		08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
4.	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	ZRP. TJ. MULYONO, SH, MH 19670922 198903 1 004 Analis Hukum Ahli Madya	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
		05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
		SRI WAHYUNINGSIH, SH 19691007 199401 2 001	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

		Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
5.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	HARYONO WIDYASTOMO, SH, MH 19671022 199303 1 006 Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
			05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
			05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
			01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
			04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
			04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
		MUKHAMAD YUSUF, S.Ag, MM 19660505 199203 1 014 Analis Kebijakan Ahli Madya	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
			04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
			01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		WORO BOEDISAYEKTI, S.Sos, M.Si	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

		19671024 198803 2 007 Analis Kebijakan Ahli Madya	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6.	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si 19800919 199912 1 001 Kepala Biro Biro Organisasi	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
			02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
			02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan
		Drs. JUWANDI, M.Si 19690419 199001 1 001 Analis Kebijakan Ahli Madya	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
			02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
		AGUSTINUS AGUS SUDARMANTO,S.STP, MM 19760812 199703 1 003 Analis Kebijakan Ahli Madya	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	YASIP KHASANI, SIP,MM 19741219 199703 1 005 Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
			03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
			03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah
		Ir. BETTY WULANDARI, M.P 19680925 199403 2 004 Analis Kebijakan Ahli Madya	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
			03	1.03	0002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
			03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

		Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM 19700416 199009 1 001 Analis Kebijakan Ahli Madya	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
			03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
			03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
8.	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	AGUS PRASUTIO, SH,M.Si 19690726 199003 1 002 Kepala Biro Perekonomian Daerah	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
			01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
			06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
			06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
			06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan
			06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
			06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan

9.	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom 19680328 199703 1 002 Plt. Kepala Biro Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
			07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
			07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
		MUFTI AGUNG WIBOWO, S.Kom, MIT 19731117 199803 1 007 Kabag Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang /Jasa	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
			07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
			07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
			01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		SUDIRMAN, SH, MM 19680110 199403 1 005 Analis Kebijakan Ahli Madya	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
			07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
			07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG,

ttd

SUMARNO